

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menjalankan tugas pengawasan terhadap koperasi dengan cara mengawasi perkembangan kegiatan koperasi secara teratur melalui peningkatan manajemen koperasi. Ini mencakup aspek kelembagaan, operasional, dan keuangan koperasi, peningkatan modal, evaluasi kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan untuk anggota, serta pemberian tindakan administratif. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan koperasi melibatkan pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan secara teratur.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di Kota Padang, Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM menghadapi beberapa hambatan. Ini meliputi ketidakdisiplinan pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun, adanya oknum pengurus koperasi yang menyalahgunakan koperasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan kurangnya intensitas pengawasan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM terhadap koperasi simpan pinjam. Untuk mengatasi masalah kurangnya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di daerah, yang disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai dan keterbatasan anggaran, Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

mengusulkan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan anggaran.

## **B. Saran**

1. Penting bagi satuan tugas pengawasan untuk menjalankan tugas mereka dengan tegas, karena kurangnya kontrol pengawasan dari pemerintah melalui satuan tugas tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, untuk masa depan, peluang terjadinya penyimpangan dalam koperasi simpan pinjam dapat diminimalkan.
2. Untuk memastikan bahwa satuan tugas pengawasan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang beroperasi dengan maksimal, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait, termasuk pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas Koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT.Rineke Cipta, Jakarta
- Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasidan Koperasi Membangun*, PT.Inti Idayu Press, Jakarta
- Ichsan Reza Nurul, Sarman Sinaga, Lukman Nasution, 2021, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, CV Sentosa Deli Pratama, Medan
- Sentosa Sembriring, 2006. *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung : Nuansa Aulia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta
- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1996, *Kamus Indonesia-Arab*, Mutiara Sumber Widya,Jakarta.
- Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan*, RajawaliPers,Jakarta.
- Widiyanti. YW. Sunida, 2002, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta,Jakarta.
- Abdul Bashith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang press, Malang
- Ign. Sukamdiyo, 2010, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Djoko Muljono, 2012 *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta,
- Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Sukardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, PT. Akademia, Jakarta.
- Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Sondang P, Siagian, *Administrasi pembangunan*, 2000, Gunung Agung, Jakarta,
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta,
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Rawan Soejoto, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta,
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, 1986, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prayudi, 1981, *Hukum Adinistrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Josep Riwu Hako, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah Di Indonesia*, Jakarta.
- ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta,
- Ahmad Subagyo, 2017, *Pengawasan Koperasi Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi

Dalam Rangka Memfasiliatsi Kegiatan Teknis Program Penguatan

Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun

2016.

Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah.

## **C. Sumber Lain**

Bambang Suprianto, 2007, *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai media pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Britannica Concise Encyclopedia, Volume 4 Nomor 2.

Syamsuri S.A, 2006, *Pendidikan Koperasi Sebagai Vektor Percepatan Pmebangunan Koprasi Indonesia, Jurnal pendidikan Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, Vol 1, Nomor 1

<http://diskop.padang.go.id/struktural>

<http://diskop.padang.go.id/profil>